



Asesmen Kebutuhan Sarana dan Prasarana Sebagai Dasar Perencanaan Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di SMPN 3 Kotabaru

Assyakhirah Nur Ridha ^{1*}, Muhammad Hafiudin Rizaldi ², Muhammad Rizhan ³,
Yeslin Anjelina Terayanti ⁴, Sulistiyana ⁵

¹⁻⁴ Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia

2420111720029@mhs.ulm.ac.id ^{1*}, 2420111710026@mhs.ulm.ac.id ², 2420111710034@mhs.ulm.ac.id ³,
2420111720018@mhs.ulm.ac.id ⁴, sulis.bk@ulm.ac.id

Korespondensi email: 2420111720029@mhs.ulm.ac.id

ABSTRACT. *This study aims to describe the needs assessment process of educational facilities and infrastructure as the foundation for educational planning to improve the quality of learning at SMPN 3 Kotabaru. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. The findings indicate that the needs assessment was conducted using a priority scale approach and reflected in school planning documents (RKS and RAPBS). However, challenges remain in asset documentation and data accuracy, particularly regarding smaller equipment and teacher involvement in formal planning. Despite these limitations, resource constraints have fostered innovation among teachers in utilizing alternative learning media. The implementation of Data-Based Planning (PBD) is considered a strategic solution to enhance the efficiency, accountability, and effectiveness of facilities management. Strengthening data literacy, digitalizing inventory systems, and ensuring synergy between schools and local governments are essential prerequisites for adaptive and sustainable educational planning.*

Keywords: *needs assessment, facilities and infrastructure, educational planning, data-based planning, school management*

ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses asesmen kebutuhan sarana dan prasarana sebagai dasar perencanaan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pembelajaran di SMPN 3 Kotabaru. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan dengan teknik wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asesmen kebutuhan telah dilaksanakan dengan pendekatan skala prioritas dan dituangkan dalam dokumen RKS dan RAPBS. Namun, dokumentasi dan pendataan aset masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal akurasi data dan pelibatan guru secara formal. Meskipun demikian, keterbatasan fasilitas justru mendorong munculnya inovasi pembelajaran di kalangan guru. Penerapan Perencanaan Berbasis Data (PBD) dipandang sebagai solusi strategis untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan sarana prasarana pendidikan. Penguatan literasi data, digitalisasi sistem inventarisasi, serta sinergi antara sekolah dan pemerintah daerah menjadi prasyarat penting bagi perencanaan pendidikan yang adaptif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: asesmen kebutuhan, sarana prasarana, perencanaan pendidikan, PBD, manajemen sekolah

1. PENDAHULUAN

Upaya peningkatan mutu pembelajaran di satuan pendidikan saat ini tidak lagi hanya bertumpu pada aspek pedagogis seperti kualitas guru atau implementasi kurikulum, tetapi juga sangat bergantung pada tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang layak dan relevan. Sarana dan prasarana bukan sekadar pelengkap dalam proses pendidikan, melainkan merupakan bagian esensial yang menopang efektivitas, interaktivitas, dan makna dari kegiatan belajar mengajar. Dalam konteks manajemen pendidikan yang modern, infrastruktur pendidikan dipandang sebagai elemen strategis yang berpengaruh langsung terhadap pencapaian standar nasional pendidikan (SNP) (Sutarto & Syamsudin, 2023).

Agar proses perencanaan pendidikan dapat dilakukan secara efektif, maka langkah awal yang krusial adalah melakukan asesmen kebutuhan sarana dan prasarana secara menyeluruh. Asesmen ini bertujuan untuk memperoleh gambaran riil mengenai kondisi fasilitas yang ada, mengidentifikasi kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan, serta merumuskan prioritas pengembangan yang adaptif terhadap pertumbuhan jumlah peserta didik maupun perkembangan teknologi pembelajaran (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023). Tanpa asesmen yang berbasis data akurat, proses perencanaan cenderung bersifat reaktif, tidak terarah, dan berisiko gagal menjawab tantangan nyata di lapangan.

Meskipun kebijakan seperti Permendikbud Nomor 24 Tahun 2007 masih menjadi acuan dalam pengelolaan fasilitas pendidikan, dalam praktiknya pendekatan kontekstual dan partisipatif jauh lebih diperlukan. Hal ini disebabkan oleh karakteristik geografis, sosial, dan ekonomi yang berbeda-beda antara satu sekolah dengan lainnya. Oleh karena itu, asesmen kebutuhan hendaknya tidak hanya menitikberatkan pada kuantitas, melainkan juga kualitas, relevansi, serta fungsi fasilitas terhadap dinamika pembelajaran yang terus berkembang (Yuliana & Hasan, 2022).

Salah satu contoh konkret adalah SMPN 3 Kotabaru, sekolah yang berada di wilayah pesisir dengan tantangan tersendiri dalam pengelolaan sarana dan prasarana. Keterbatasan anggaran, kondisi geografis yang menyulitkan akses, serta peningkatan jumlah peserta didik tiap tahun menuntut penerapan pendekatan perencanaan berbasis bukti. Dalam hal ini, asesmen kebutuhan menjadi pijakan penting untuk memastikan sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal, termasuk menjalin kemitraan dengan pemerintah daerah maupun komunitas, serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan (Rahayu & Firmansyah, 2023). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang menekankan pada otonomi, partisipasi pemangku kepentingan, dan pengambilan keputusan berbasis data.

Pengelolaan sarana dan prasarana dalam pendidikan mencakup kegiatan perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pemeliharaan, serta evaluasi dan penghapusan aset. Sarana pendidikan mencakup alat yang secara langsung digunakan dalam proses belajar mengajar, seperti buku, media, dan alat peraga, sedangkan prasarana mencakup bangunan, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas pendukung lainnya (Mulyasa, 2018). Kelima tahap tersebut harus dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan keberlanjutan.

Dalam konteks operasional, perencanaan (planning) dilakukan melalui identifikasi kebutuhan, penyusunan skala prioritas, dan alokasi anggaran. Tahap pengadaan (procurement) melibatkan berbagai strategi seperti pembelian langsung, kerja sama dengan pihak eksternal, atau melalui bantuan pemerintah. Tahap pendayagunaan (utilization) mengutamakan pemanfaatan fasilitas secara bijak dan proporsional, sementara pemeliharaan (maintenance) berfokus pada perawatan berkala untuk menjaga fungsi fasilitas. Tahap akhir, yaitu evaluasi dan penghapusan (evaluation and disposal), mencakup monitoring efektivitas penggunaan serta pemutusan terhadap aset yang sudah tidak layak guna.

Efektivitas pengelolaan sarana prasarana juga sangat dipengaruhi oleh keterlibatan berbagai pihak. Kepala sekolah, guru, peserta didik, komite sekolah, dan masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan tata kelola yang partisipatif. Yusri dan Habibah (2022) menunjukkan bahwa sekolah yang melibatkan komunitas dalam pengelolaan fasilitas memiliki tingkat keberfungsian sarana yang lebih baik serta tumbuhnya rasa kepemilikan terhadap aset sekolah.

Meski demikian, berbagai kendala masih kerap dihadapi, mulai dari keterbatasan dana, kurangnya data kebutuhan yang valid, hingga rendahnya kapasitas teknis dalam pengelolaan aset. Dalam mengatasi hal ini, perlu dilakukan penguatan kapasitas kepala sekolah sebagai

manajer pendidikan, termasuk penggunaan sistem digital inventarisasi untuk mendukung transparansi dan efisiensi (Arifin & Wahyuni, 2023).

Lebih lanjut, pelaksanaan asesmen kebutuhan dan penyusunan perencanaan strategis merupakan bagian penting dalam upaya transformasi pendidikan di sekolah. Ketika satuan pendidikan mengalami stagnasi atau menghadapi tantangan signifikan, asesmen kebutuhan menjadi instrumen vital untuk melakukan revitalisasi dan perbaikan menyeluruh (Susanti et al., 2021). Dalam kerangka regulasi nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 menegaskan pentingnya standar nasional pendidikan yang mencakup sarana prasarana, yang selanjutnya diimplementasikan melalui sistem penilaian internal dan eksternal untuk menjamin mutu pembelajaran (Poerwanti, 2015).

Sebagai bagian dari kegiatan evaluatif, identifikasi kebutuhan terhadap sarana dan prasarana tidak dapat dipisahkan dari proses asesmen secara luas. Asesmen, meskipun sering disamakan dengan evaluasi atau pengukuran, memiliki karakteristik tersendiri yang saling melengkapi. Baik asesmen maupun evaluasi menjadi masukan penting dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang tidak bersifat instan, melainkan melalui proses analisis mendalam, berbasis data objektif, serta didukung oleh kajian ilmiah yang relevan (Tambunan, 2022).

Dengan demikian, urgensi pelaksanaan asesmen kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan menjadi kunci dalam menciptakan sistem perencanaan pendidikan yang adaptif, responsif, dan visioner. Perencanaan yang baik tidak hanya menjawab kebutuhan saat ini, tetapi juga mempersiapkan institusi pendidikan menghadapi tantangan masa depan dengan lebih siap dan berdaya saing.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam proses asesmen kebutuhan sarana dan prasarana sebagai dasar dalam perencanaan pendidikan guna meningkatkan kualitas pembelajaran di SMPN 3 Kotabaru. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara kontekstual dinamika kebijakan, praktik manajerial, serta keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan (Sugiyono, 2021). Penelitian dilakukan di SMPN 3 Kotabaru dengan subjek yang dipilih secara purposif, terdiri atas kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana, guru, tenaga administrasi, serta perwakilan komite sekolah (Moleong, 2019).

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi (Creswell & Poth, 2018). Wawancara mendalam dilakukan terhadap kepala sekolah dan guru untuk menggali informasi tentang kebijakan, mekanisme asesmen, serta proses perencanaan yang dijalankan. Observasi dilakukan secara langsung terhadap kondisi fisik sarana prasarana, penggunaan fasilitas dalam proses pembelajaran, dan keterlibatan warga sekolah dalam pemeliharaan fasilitas tersebut. Sementara itu, studi dokumentasi meliputi penelaahan dokumen perencanaan sekolah, berita acara inventarisasi, laporan evaluasi sarana prasarana, serta dokumen hasil musyawarah sekolah. Instrumen yang digunakan meliputi pedoman wawancara semi-terstruktur, lembar observasi kondisi fasilitas, serta checklist dokumen pendukung.

Data yang terkumpul dianalisis dengan model analisis interaktif menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilah informasi yang relevan dan menyederhanakan data tanpa menghilangkan makna. Penyajian data disusun dalam bentuk narasi tematik dan matriks kategorisasi, sementara kesimpulan diperoleh dari pola dan hubungan antar informasi yang telah divalidasi. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan empat kriteria menurut Lincoln dan Guba (1985), yaitu kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Kredibilitas diperoleh melalui triangulasi sumber dan metode, serta proses member check. Transferabilitas dijaga melalui deskripsi rinci konteks penelitian, dependabilitas dicapai dengan dokumentasi proses penelitian secara sistematis, dan konfirmabilitas ditunjang oleh bukti objektif yang dapat ditelusuri dari catatan lapangan dan dokumen resmi sekolah.

3. PEMBAHASAN

SMP Negeri 3 Kotabaru yang berlokasi di Kelurahan Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, merupakan salah satu satuan pendidikan menengah pertama negeri yang telah berdiri sejak 7 Maret 1979 berdasarkan SK Mendikbud No. 034/0/1979. Sekolah ini menempati lahan seluas kurang lebih 20.000 meter persegi dan menyelenggarakan kegiatan belajar selama enam hari dalam sepekan. Dengan akreditasi B berdasarkan sertifikat BAN-SM No. 1347/BAN-SM/SK/2021, sekolah ini menyediakan berbagai fasilitas seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, ruang ibadah, ruang UKS, dan ruang guru. Seluruh kelas dilengkapi dengan sarana penunjang pembelajaran seperti meja, kursi, papan tulis, serta perlengkapan kebersihan. Ketersediaan ini menunjukkan adanya komitmen untuk menyediakan lingkungan belajar yang kondusif, representatif, serta mendukung pengembangan akademik dan karakter siswa.

Hasil wawancara dan dokumentasi menunjukkan bahwa asesmen kebutuhan sarana dan prasarana di SMPN 3 Kotabaru dilaksanakan secara bertahap melalui pendekatan skala prioritas, yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Dana BOS digunakan untuk perawatan ringan dan sedang, sementara kerusakan berat seperti struktur bangunan yang rusak dilaporkan ke Dinas Pendidikan agar mendapat bantuan dari pemerintah daerah. Pendekatan ini mencerminkan efisiensi penggunaan anggaran serta pentingnya sinergi antara sekolah dan pemerintah. Hal ini mendukung pendapat Ahmad Suriansyah (2020) yang menyatakan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana harus berbasis pada skala kebutuhan yang berdampak langsung terhadap proses pembelajaran peserta didik.

Namun demikian, pelaksanaan asesmen kebutuhan belum sepenuhnya terdokumentasi secara sistematis. Masih ditemukan kendala dalam pencatatan data aset, terutama pada peralatan kecil seperti alat laboratorium dan media pembelajaran. Data mengenai usia pakai, kondisi, dan kelayakan pemanfaatan belum selalu akurat. Kondisi ini menyebabkan perencanaan pengadaan menjadi kurang tepat. Menurut Suriansyah (2021), integrasi data inventarisasi yang akurat sangat diperlukan dalam proses asesmen agar keputusan yang diambil benar-benar objektif dan sesuai dengan kebutuhan nyata.

Selain kepala sekolah, guru juga memiliki peran penting dalam proses identifikasi kebutuhan fasilitas pembelajaran. Guru-guru sering mengajukan usulan seperti penambahan LCD proyektor, peningkatan daya listrik, hingga penggantian peralatan olahraga. Walaupun usulan tersebut sering kali disampaikan secara informal melalui rapat atau diskusi, kontribusi mereka sangat penting dalam menggambarkan kondisi faktual di lapangan.

Sayangnya, tidak semua usulan guru tercatat secara resmi dalam RKAS. Akibatnya, beberapa kebutuhan mendesak tidak terakomodasi dalam perencanaan anggaran. Suhaimi (2021) menegaskan bahwa minimnya pelibatan guru dalam proses formal perencanaan merupakan refleksi dari lemahnya manajemen partisipatif. Ia menyarankan bahwa seluruh stakeholder sekolah, termasuk guru, harus terlibat aktif dalam penyusunan strategi perencanaan agar pengelolaan pendidikan menjadi lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan nyata.

Keterbatasan sarana justru memicu munculnya inovasi dan kreativitas guru. Sebagian guru menyampaikan bahwa mereka menggunakan alat peraga buatan sendiri dari bahan sederhana seperti karton, mencetak media gambar mandiri, atau bahkan mengajak siswa membawa alat pribadi dari rumah. Dalam beberapa kegiatan praktik, mereka memanfaatkan fasilitas umum seperti kolam renang atau gedung olahraga. Praktik ini menunjukkan ketangguhan dan fleksibilitas pendidik dalam menghadapi keterbatasan. Ahmad Suriansyah (2022) menyatakan bahwa karakter semacam ini merupakan bagian penting dari profesionalisme guru, terutama di tengah tekanan keterbatasan anggaran dan tuntutan kualitas pendidikan yang semakin tinggi.

Secara umum, pelaksanaan asesmen kebutuhan di SMPN 3 Kotabaru telah mencerminkan adanya landasan manajerial yang kuat. Meskipun belum sempurna, praktik yang dilakukan telah mengarah pada efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan sarana prasarana. Namun, dibutuhkan penguatan dalam hal dokumentasi, pendataan, serta sistem pelaporan agar hasil asesmen benar-benar dapat menjadi dasar bagi perencanaan strategis jangka panjang. Sejalan dengan pandangan Suhaimi (2021), asesmen yang baik tidak hanya digunakan untuk mengidentifikasi kekurangan, tetapi juga sebagai landasan perencanaan pendidikan berkelanjutan.

Dalam kerangka yang lebih luas, penerapan Perencanaan Berbasis Data (PBD) menjadi sangat relevan dan strategis. PBD merupakan pendekatan manajerial yang menggunakan data akurat, relevan, dan terkini sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan penyusunan program pendidikan. PBD memungkinkan sekolah untuk mengidentifikasi masalah secara tepat, menyusun prioritas yang sesuai, serta mengalokasikan sumber daya secara efisien dan efektif (Eminarni et al., 2025; Rahayu & Amiruddin, 2024).

Dampak PBD terhadap mutu pembelajaran sangat signifikan. Melalui pendekatan ini, sekolah dapat mengidentifikasi kebutuhan riil peserta didik, mengatasi kelemahan dalam proses pembelajaran, dan melakukan intervensi yang lebih tepat sasaran. Hal ini akan berujung pada peningkatan hasil belajar serta efisiensi pemanfaatan sumber daya. Di samping itu, PBD juga mendorong tumbuhnya budaya evaluasi berkelanjutan dan pengambilan keputusan berbasis bukti yang mampu memperkuat kualitas layanan pendidikan (Diany & Mardiansjah, 2025; Eminarni et al., 2025).

Untuk mengoptimalkan implementasi PBD, diperlukan peningkatan literasi data di kalangan pendidik, ketersediaan infrastruktur teknologi informasi, serta sinergi yang kuat antara sekolah, pemerintah daerah, dan lembaga riset. Kolaborasi ini menjadi kunci dalam membangun sistem pendidikan yang tidak hanya adaptif terhadap perubahan, tetapi juga berorientasi pada mutu dan keberlanjutan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan asesmen kebutuhan sarana dan prasarana di SMPN 3 Kotabaru telah menunjukkan adanya kesadaran manajerial yang baik, meskipun implementasinya belum sepenuhnya sistematis dan terdokumentasi secara menyeluruh. Sekolah telah berupaya melakukan identifikasi kebutuhan berdasarkan skala prioritas, yang dituangkan dalam dokumen perencanaan seperti RKS dan RAPBS. Penggunaan dana BOS untuk pemeliharaan rutin dan pelaporan kerusakan berat kepada Dinas Pendidikan mencerminkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya serta adanya sinergi antara sekolah dan pemerintah daerah.

Namun demikian, proses asesmen masih menghadapi tantangan dalam aspek pendataan aset secara akurat, terutama untuk perlengkapan kecil seperti media pembelajaran dan alat laboratorium. Ketiadaan data yang lengkap mengenai kondisi, usia pakai, dan kelayakan fasilitas menghambat presisi dalam penyusunan rencana pengadaan. Selain itu, meskipun guru memiliki peran penting dalam mengidentifikasi kebutuhan dan sering memberikan masukan, belum semua usulan mereka tercatat dalam dokumen perencanaan resmi seperti RKAS, yang berakibat pada kurang optimalnya respons terhadap kebutuhan pedagogis aktual.

Situasi ini juga mendorong munculnya inovasi pembelajaran dari para guru yang memanfaatkan bahan sederhana maupun fasilitas publik untuk mengatasi keterbatasan. Hal ini menunjukkan ketangguhan, kreativitas, dan profesionalisme guru dalam menjalankan tugasnya meskipun dalam kondisi minim sumber daya. Namun, untuk menjadikan proses asesmen sebagai fondasi perencanaan strategis yang kuat, perlu dilakukan penguatan pada sistem dokumentasi, digitalisasi inventarisasi aset, serta peningkatan kapasitas teknis manajerial di tingkat sekolah.

Selanjutnya, penerapan Perencanaan Berbasis Data (PBD) menjadi sangat relevan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas pengambilan keputusan dalam pengelolaan sarana prasarana. PBD memungkinkan sekolah menyusun prioritas yang tepat, mengalokasikan anggaran secara proporsional, dan merancang program pengembangan yang berbasis kebutuhan riil. PBD juga mendorong budaya evaluasi berkelanjutan dan akuntabilitas dalam manajemen pendidikan. Oleh karena itu, penguatan literasi data di kalangan pendidik, dukungan infrastruktur teknologi, serta kolaborasi antara sekolah, pemerintah, dan lembaga riset menjadi kunci dalam mewujudkan pengelolaan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan mutu pembelajaran secara berkelanjutan dan adaptif terhadap tantangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M., & Wahyuni, S. (2023). Digitalisasi pengelolaan sarana prasarana di sekolah menengah. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 11(2), 88–102.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Depdiknas. (2019). *Pedoman manajemen berbasis sekolah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Diany, S., & Mardiansjah, M. (2025). Dampak perencanaan berbasis data terhadap peningkatan hasil belajar siswa di pendidikan dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 9(4).
- Eka Susanti, D., Sudirman, S., & Fahrudin, F. (2021). Peran asesmen kebutuhan dan perencanaan pendidikan dalam pengembangan lembaga pendidikan khusus (ABK). *JPAP (Jurnal Praktisi Administrasi Pendidikan)*, 5(2), 64–68. <https://doi.org/10.29303/jpap.v5i2.492>
- Eminarni, F. A., dkk. (2025). Perencanaan berbasis data sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. *JANACITTA: Journal of Primary and Children's Education*, 8(1), 225–237.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2023). *Panduan asesmen kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2018). *Manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Poerwanti, E. (2015). *Konsep dasar asesmen pembelajaran*. PT Remaja Rosdakarya.
- Rahayu, D., & Firmansyah, A. (2023). Manajemen pendidikan berbasis data dalam perencanaan sarana prasarana sekolah. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 30(2), 112–125.
- Rahayu, S., & Amiruddin, A. (2024). Manajemen pendidikan berbasis data: Pendekatan dan implementasi. *Jurnal Pendidikan dan Manajemen*, 7(2), 112–125.
- Setiyana, S. (2022). Partisipasi guru dalam pengelolaan sarana prasarana untuk mendukung kurikulum merdeka. *Jurnal Ilmu Administrasi Pendidikan*, 3(1), 45–54.
- Sugiyono. (2021). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. CV Alfabeta.
- Suhaimi. (2021). Penerapan asesmen kebutuhan dalam perencanaan pendidikan sekolah dasar. *Jurnal Kependidikan ULM*, 6(2), 77–85.
- Suriansyah, A. (2020). *Manajemen pendidikan: Teori dan praktik di sekolah*. Universitas Lambung Mangkurat Press.
- Suriansyah, A. (2021). Strategi kepala sekolah dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 5(2), 112–124.
- Suriansyah, A. (2022). Kepemimpinan transformasional dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran. *Seminar Nasional Pendidikan*, Universitas Lambung Mangkurat.
- Sutarto, A., & Syamsudin, M. (2023). Efektivitas asesmen kebutuhan dalam perencanaan pendidikan berkelanjutan. *Jurnal Manajemen dan Supervisi Pendidikan*, 11(1), 45–59.

- Tambunan, A. (2022). Konsep ilmu manajemen sarana prasarana pendidikan Kristen. *Satya Sastraharing: Jurnal Manajemen*, 6(1). <https://doi.org/10.33363/satya-sastraharing.v6i1.843>
- Yuliana, R., & Hasan, M. (2022). Asesmen berbasis kontekstual untuk pengembangan sarana prasarana sekolah di wilayah 3T. *Edukasi Nusantara*, 8(3), 87–101.
- Yusri, H., & Habibah, S. (2022). Pengaruh partisipasi komite sekolah terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 17(3), 34–47.